****

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SINJAI\***

**SRIANTI PERMATA**

Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Ekonomi

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Makassar

e-mail: permatasri23@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai (ii) untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. (iii) untuk mengetahui apakah hasil kekeayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. (iv) untuk mengetahui apakah Pendapatan lain daerah yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. (v) untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan pendapatan lain daerah yang sah, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series dan data diperoleh dari dokumen atau laporan tertulis yang bersumber dari badan pendapatan daerah dan badan pusat statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R2, dan juga menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. (ii) Retribusi Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai. (iii) Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai. (iv) Pendapatan lain-lain yang Sah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai. (v) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan lain-lain yang Sah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

**ABSTRACT**

SRIANTI PERMATA. 2017. The Influence Of Local Generated Revenue on Economic Growth In Sinjai District (Supervised by Chalid Imran Musa and Herman).

The objectives of the research were to discover (i) whether Local Tax has influenced on economic growth in Sinjai District, (ii) whether Local Retribution has influenced on economic growth in Sinjai District, (iii) whether separated regional wealth has influenced on economic growth in Sinjai District, (iv) whether other legitimate regional income has influenced o economic growth in Sinjai District, (v) whether local tax, local retribution, Regional Owned Enterprise income, and other legitimate regional income simultaneously have influenced on Economic Growth in Sinjai District.

The Research employed quantitative approach. The data of research were secondary data with time series and data obtained from documents or written reports from local revenue agency and Central Bureau of Statistics. The research employed statistics tests, namely multiple linear regression, t test, F test, and R2 test as well as classical assumption test, namely multicolinearity test and autocorrelation test.

The results of the research revealed that (1) Local Tax has positive and significant influence on economic growth in Sinjai District, (ii) Local Retribution has no significant influence on economic growth in Sinjai District, (iii) separated Regional Wealth has no significant influence on economic growth in Sinjai District, (iv) Other Legitimate Regional Income has significant influence on economic growth in Sinjai District, (v) Local Tax, Local Retribution, Separated Regional Income, and Other legitimate Regional Income simultaneously have positive and significant influence on economic growth in Sinjai District.

**Keyword** : *Local Generated Revenue, Economic Growth*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana didalamnya dikenal adanya daerah-daerah otonom sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi sesuai dengan ketentuan UU No 12 tahun 2008 maka ada 2 (dua) tingkatan daerah otonom yaitu daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri, yang dibagi menjadi daerah tingkat I (Propinsi) dan daerah tingkat II (Kabupaten dan kota Madya). Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat telah membagi berbagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan, sebagaimana yang diatur dalam undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah pendukungnya. Adapun sumber – sumber pendapatan asli daerah menurut undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 antara lain :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah

Menuurut Aziz, (1997) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolak ukur yang penting dalam menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian bagi daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota yang pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah itu sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya..

Menurut (Sumitro,1995) Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Besarnya tingkat Pendapatan Asli Daerah diPemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya alokasi yang menyangkut komponen – komponen PAD yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain –lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Dengan pengelolaan dan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, maka kabupaten Sinjai diharapkan dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya lainnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Syafrizal (1997) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan (unggulan). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat spesialisasidandayasaing untukmeningkatkan keunggulan komparatif suatus sektor ekonomi di suatu daerah adalah melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sector disuatu daerah terhadap jumlah output total (PDRB) di wilayah studidan di wilayah referensinya.

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga akan terlihat peran dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya-upaya konkrit perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut melalui peningkatan sumber penerima daerah, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Hal ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak ataupun retribusi.

Saragih (2003) menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak berarti terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang memiliki perekonomian yang baik akan memiliki PAD yang tinggi. Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik kondisi perekonomian uatu daerah akan menunjang terhadap peningkatan PAD.

Kabupaten Sinjai sebagai daerah otonom, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan otonomi daerah. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, setiap Daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja, akan tetapi juga bersumber dari pendapatan Daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam penciptaan kemandirian daerah,

Menurut (Sukirno,1978), keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui PDRB yang dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah.

Salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan PDRB (produk Domestik regional bruto). Pada tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB baik harga berlaku maupun harga konstan yang merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sinjai selama 5 tahun dari tahun 2011-2015. Di mana menunjukkan bahwa nilai PDRB baik harga berlaku maupun harga kostan mengalami peningkatan dari dari tahun ke tahun tetapi nilai pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini dapat dipengruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti; harga dan jumlah produksi.

Berdasarkan dari pemaparan data di atas dapat saya simpulkan bahwa fluktuasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai menggambarkan antara target dan realisasi, di mana realisasi selalu melampaui target. Hal ini menandakan bahwa adanya ketidakmampuan atau kelemahan dari pihak daerah mengelaborasi potensi-potensi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sinjai diantaraya : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain –lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Sedangkan data perumbuhan ekonomi pun mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai berada pada kategori di bawah rata-rata dibandingkan daerah yang ada di Sulawesi Selatan . Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum memaksimalkan kinerjanya untuk memacu pembangunan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. Melihat faktor-faktor tersebut hal ini menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berbanding lurus dengan Pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah di atas perlu adanya penggalakkan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai. Olehnya, peneliti akan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai.”** Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.
3. Untuk mengetahui apakah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.
4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan lain daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan di Kabupaten Sinjai.
5. Untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah, bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kuantitatif, di mana data yang diperoleh menggunakan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sedangkan, tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autokolerasi dan heterokedastisitas, analisis regresi linear berganda, analisis kolerasi, uji t dan uji F.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **HASIL**
2. **Keadaan Geografi**

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya di daerah pantai timu sekitar 223 km dari Kota Makassar, Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Sinjai,Sinjai adalah salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kotayang berbatasan dengan tiga Kabupaten yaitu Bone di sebelah utara, Bulukumba di sebelah selatan, dan Gowa di sebelah barat, Letak astronomisnya antara 5o 2’ 56’’ dan 5o 21’ 16’’ Lintang selatan dan antara 119o 56’ 30” dan 120o 25’ 33” Bujur Timur.

Secara geografis kewilayahan, kabupaten ini berbatasan dengan daerah disekitarnya, Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sinjai antara lain meliputi :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa,

Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km2 (81996 Ha) terdiri dari 9 Kecamatan defenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan,Wilayah Kabupaten Sinjai terbagi dua yakni berada di daratan Sulawesi Selatan dan Pulau-Pulau yang dikenal dengan Pulau-Pulau Sembilan, Pada wilayah daratan memiliki panjang garis pantai sekitar 23 km, dan terdapat lima sungai besar yang bermuara di sepanjang pantai yakni Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Panaikang, Sungai Bua, Sungai dan Sungai Pattongko, Selain itu, juga terdapat dua sungai kecil yakni Sungai Donga dan Sungai Balampangi. Keberadaan sungai-sungai tersebut juga merupakan batas wilayah administrasi baik desa, kecamatan, maupun antar kabupaten, Sungai Tangka menandai batas antara Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone, Sungai Mangottong sebagai batas Kecamatan Sinjai Utara dengan Sinjai Timur, Sungai Panaikang menandai batas antaraDesa Samataring dengan Desa Panaikang Sinjai Timur, Sungai Bua merupakan batas antara Kecamatan Sinjai Timur dengan Kecamatan Tellu Limpoe, dan Sungai Pattongko (Sungai Lolisang) menandai batas Kabupaten Sinjai dengan Kabupaten Bulukumba.

Sebagian besar desa di Kabupaten Sinjai merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 68 desa dengan topografi wilayah hampir merata antara berada di lereng dan dataran, 35 desa berada di lereng/punggung bukit dan 32 desa berada di dataran,

Secara geografis, Kabupaten Sinjai memiliki topografi wilayah yang terbagi atas :

1. Dataran rendah yang meliputi Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Sinjai Timur
2. Dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Borong
3. Kepulauan yang meliputi Kecamatan Pulau Sembilan, Rangkaian pulau-pulau ini terbentang memanjang hingga mendekati Pulau Buton.

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Sinjai membawahi 9 (sembilan) kecamatan yaitu antara lain :

1. Kecamatan Sinjai Barat
2. Kecamatan Sinjai Selatan
3. Kecamatan Sinjai Tengah
4. Kecamatan Sinjai Timur
5. Kecamatan Sinjai Utara
6. Kecamatan Sinjai Borong
7. Kecamatan Bulupoddo
8. Kecamatan Tellu Limpoe

Kecamatan Pulau Sembilan

1. **Kependudukan dan Tenaga Kerja**

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai, sebesar 228,936 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,59 persen, yang terdiri dari 104,573 jiwa penduduk laki-laki dan 113,073 jiwa penduduk perempuan, Sex Ratio sebesar 92 persen artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai sebesar 265 jiwa per km dengan Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 1,279 per km dan Kecamatan Sinjai Barat dengan kepadatan terendah yakni 167 km,.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sinjai sebahagian besar bekerja di sector pertanian dalam arti luas, hal ini ditunjang oleh kondisi wilayah yang merupakan wilayah tiga dimensi yaitu laut/pesisir, daratan rendah dan pegunungan yang pada umumnya potensial untuk pengembangan sektor pertanian.

1. **Hasil Penelitian**

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas ber pengaruh terhadap variabel terikat.Dalam hal ini dapat dilihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Di bawah ini adalah hasil estimasi pengujian *Statiscial Program For Service Solution*(SPSS).

* + - * 1. Uji Normalitas

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal tau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov Z* dan uji normalitas residual dengan melihat sebaran plot pada data yang telah diuji. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.7. Uji Normalitas dengan *Kologmorov-Smirnov Z*

|  |
| --- |
| **On - Sample *Kologmorov-Smirnov* Test** |
| **Variabel** | **Kologmorov-Smirnov Z** | **Asymp. Sig. (2-tailed)** |
| Pertumbuhan Ekonomi | 0.505 | 0.960 |
| Pajak Daerah | 0.616 | 0.901 |
| Retribusi Daerah | 0.571 | 0.842 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah | 1.011 | 0.259 |
| Pendapatan Lain-Lain yang Sah | 0.827 | 0.501 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa model regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat berdistirbusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji probabilitas pada SPSS 21 yang terlihat pada nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* semua nilai variabel pendapatan, modal, dan luas lahan lebih besar dari 0,05. Dimana variabel Pertumbuhan Ekonomi nilainya 0.960 > 0.05, Variabel Pajak Daerah nilainya 0.901 > 0,05, variabel Retribusi Daerah nilainya 0.842 > 0,05, variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah nilainya 0.259 > 0,05, variabel Pendapatan Lain-Lain yang Sah nilainya 0.501 > 0,05.

* + - * 1. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Persamaan regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunkan uji *Durbin Watson.* Jika DW > dL, maka tidak ada autokorelasi; jika DW < dL, maka ada autokorelasi positif jika DW > 4 – dL, maka ada autokorelasi negatif; jika dL <DW < du, maka tidak dapat disimpulkan/ragu-ragu/tidak meyakinkanAdapun hasil pengujian autokorelasi *Durbin Watson* dengan menggunakan analisis SPSS 21 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

|  |
| --- |
| Model Summary |
| **Model** | **Durbin Watson** |
| 1 | 2,109 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi. Hal ini dapat dilihat nilai *Durbin Watson* 1,934. Dimana nilai tersebut sesuai dengan syarat suatu model regresi yang tidak terjadi autokorelasi.

* + - * 1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan linear yang pasti antara beberapa variabel atau semua variabel independen yang menjelaskan tentang model regresi suatu penelitian. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu penelitian dapat dililaht pada nilai *Tolerance*  dan VIF (*Variance Inflation Factor)*, yaitu: jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian. Namun, jika nilai *Tolerance* <0,10 dan VIF > 10, maka diartikan bahwa terjadi multikolineritas atau gangguan pada penelitian tersebut. Adapun hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 21 dapat dilihat pada tabel dibawah in.

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinearitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Tolerance** | **VIF** |
| Pajak Daerah | 0,556 | 1,798 |
| Retribusi Daerah | 0,658 | 1,520 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah | 0,508 | 1,967 |
| Pendapatan Lain-Lain yang Sah | 0,606 | 1,649 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* semua variabel independent > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dimana nilai *Tolerance* variabel Pajak Daerah sebesar 0,556 dan nilai VIF sebesar 1,798, Retribusi Daerah sebesar 0,658 dan nilai VIF sebesar 1,520, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah sebesar 0,508 dan nilai VIF sebesar 1.967, Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 0,606 dan nilai VIF sebesar 1,649, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresinya.

* + - * 1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik dalam suatu penelitian adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi dilakukan uji *Glesjer*.

Uji *Glesjer* dilakukan dengan cara meregresikan anatar variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari (>) 0,05, maka dinyatakan tidak terjadi heterokastisitas. Untuk lebih jelas hasil uji heterokedastisitas dengan uji *Glesjer* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji *Glesjer*

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| **Modal** | **T** | **Sig** |
| Pajak Daerah | 0,000 | 1,000 |
| Retribusi Daerah | 0,000 | 1,000 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah | 0,000 | 1,000 |
| Pendapatan Lain-Lain yang Sah | 0,000 | 1,000 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *Glesjer* dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel modal (X1) 1,000, begitu pun dengan luas lahan (X2) 1,000, yang artinya nilai signifikansinya > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Hasil uji heterokedastisitas juga dapat di lakukan dengan menggunakan polo *scatterplot* . Apabila dari grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas atau dibawah angka nol, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk suatu pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik tidak berpola. Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan *Scatterplot* karena data yang di uji dalam penelitian ini sangat sedikit jumlahnya.

Berdasarkan keempat uji asumsi klasik diatas menunjukkan bahwa model regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan SPSS 21 tidak mengalami penyimpangan asumsi klasik sehingga efisien untuk menggambarkan bentuk hubungan antara variabel dalam penelitian.

* 1. Analisis Regresi berganda

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen, dalam hal ini Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah (X3), dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah (X4) terhadap variabel dependen atau Pertumbuhan Ekonomi (Y). Dalam penelitian ini analisis regresi berganda di uji dengan menggunakan analisis SPSS *for windows release* 21.

 Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| **Model** | **Undstandarddized Coefficiens** | **Std. Coeffics** |
| **B** | **Std. Error** |  |
| (Constant) | 389.64 | 230.169 |  |
| Pajak Daerah | 4,744 | 1.263 | .723 |
| Retribusi Daerah | 0,616 | 0.976 | .109 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah |  -1.553 |  1.034 |  -.313 |
| Pendapatan Lain-Lain yang Sah | -2.462 | .375 | -.454 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa persamaan koefisien regresi berganda dalam penelitian ini adalah :

PE = 389.646 + 4,744 PD + 0,616 RD + -1,553 HPKMD + (-2,462) PLLD

1. Konstanta = 389.646

Jika nilai intersept atau konstanta sebesar 389.646 pada faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi periode tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa tanpa variabel indenpenden (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah), maka nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten Sinjai tahun 2006-2015 akan tetap sbesar 389.646.

1. Koefisien Pajak Daerah (PD) = 4,744

Nilai koefisien regresi pada variabel Pajak Daerah adalah sebesar 4,744. hal ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan Pajak Daerah sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sinjai sebesar 4,744 persen. Sebaliknya jika terjadi penurunan Rp. 1 dari Pajak Daerah dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.

1. Koefisien Retribusi Daerah (RD) = 0,616

Nilai koefisien regresi pada variabel Retribusi Daerah adalah sebesar 0,616 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sinjai sebesar 0,616 persen.

1. Koefisien Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah (HPKMD) = -1,553

Nilai koefesien regresi pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah sebesar -1,553 atau mempunyai nilai negatif. Hal ini berarti adanya penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daeraha akan menurunkan Petumbuhan ekonomi kabupaten Sinjai.

1. Koefisien Pendapatan Lain-Lain yang Sah (PLLS) = -2,462

Nilai koefesien regresi pada variabel Pendapatan Lain-Lain yang Sah sebesar 2,462 atau mempunyai nilai negatif. Hal ini berarti adanya penurunan Pendapatan Lain-Lain yang Sah akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai.

Persamaan Koefisien analisis regresi diatas menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

* 1. Uji Hipotesis
		+ - 1. Uji Simultan (Uji F)

 Uji hipotesis secara simultan atau bersama-sama (uji F) antara variabel independen dalam hal ini Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah (X3), dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah (X4) terhadap variabel dependen atau Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil analisis uji simultan dalam penelitian ini telah diuji dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.12. Hasi Uji Hipotesis dengan Uji Simultan (Uji F)

|  |
| --- |
| **Anovaa** |
| **Modal** | **F** | **Sig** |
| Regressions | 10.880 | 0.011 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji simultan dapat diketahui bahwa Fhitung 10.880 dengan nilai signifikansi 0,011, yang artinya nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa nilai Fhitung yang diperoleh signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah (X3), dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah (X4) secara simultan (bersama-sama) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

* + - * 1. Uji Parsial (uji t)

 Uji pasial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dimana dalam hal ini uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah (X3), dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah (X4) terhadap variabel dependen atau Pertumbuhan Ekonomi (Y). Adapun hasil uji hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13. Hasil Uji Hipotesis dengan uji Parsial (Uji t)

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| **Modal** | **T** | **Sig** |
| Pajak Daerah | 3,757 | 0,013 |
| Retribusi Daerah | 0,616 | 0,565 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah | -1,553 | 0,181 |
| Pendapatan Lain-Lain yang Sah | -2,462 | 0,057 |

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan secara parsial, dapat diketahui bahwa Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dengan nilai t hitung = 3,757 > t tabel = 2,47, artinya Pajak Daerah) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. Variabel Retribusi Daerah dengan nilai t hitung = 0,616 < t tabel = 2,47, artinya tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah dengan nilai t hitung = -1,553 < t tabel = 2,47, artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. Pendapatan Lain-Lain yang Sah dengan nilai t hitung = -2, 462 < t tabel = 2,47, artinya Pendapatan Lain-Lain yang Sah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.

* + - * 1. Ketetapan Determinasi (R2)

Ketepatan atau kesesuaian modal (*goognes of fit*) dilakukan dihitung melalui R2 dan *Adjusted* R2. Pada R2 diartikan besarnya persentae sumbangan variabel bebas (X) terhadap variasi (Naik-turunnya) variabel tidak bebas (Y), sedangkan lainnya merupakan sumbangan dari faktor lainnya yang tidak masuk dalam model, atau menurut (Rahim, 2012) untuk mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh X dalam model regresi, kemudian dilihat pula berapa besar kontribusi variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat melalui nilai *Adjusted R2*.

Tabel 4.12. Hasi Uji Hipotesis dengan Uji Simultan (Uji F)

|  |
| --- |
| Model Summary**b** |
| Model | **R Square** | **Adjusted R Square** |
| 1 | 0.897 | 0.815 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21, 2017

Tabel 4.15 menjelaskan dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai *Adjusted* R2 sebesar 0,815 atau 81,5 persen yang berarti bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai sebesar 81,5 persen dan sisanya 39,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini dan dijelaskan oleh variabel lain di luar model hal ini dikarenakan kompleksnya variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

* + 1. **PEMBAHASAN**
1. **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai**

Hasil penelitian yang telah di uji dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 dapat diketahui bahwa variabel Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan teori Solow, dimana pertumbuhan
ekonomi tergantung pada penyediaan faktor-faktor produksi, salah satunya adalah
akumulasi modal dalam hal ini adalah pajak daerah. Berdasarkan teori tersebut
diketahui bahwa variabel input khususnya pajak daerah memiliki peranan penting
karena akan menentukan besarnya jumlah output yang dihasilkan. Hal ini
disebabkan pajak daerah digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi dan akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produksi PDRB).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Amiel et al., (2010) melakukan penelitian yang sama tentang pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat memperoleh hasil bahwa besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama tahun 1990-2010.

1. **Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai**

Hasil penelitian yang telah di uji dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 dapat diketahui bahwa variabel Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi Daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berbanding terbalik dengan teori Sollow dimana penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan. Berdasarkan teori dimana retribusi daerah masuk kedalam faktor-faktor produksi khususnya akumulasi modal. Apabila penerimaan retribusi meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) karena retribusi daerah ini digunakan sebagai modal untuk menghasilkan besaran output berupa barang maupun jasa. Namun, berdasarkan data yang ada retribusi daerah di Kabupaten Sinjai cenderung menurun. Hal ini berarti terdapat gap antara teori dan data yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, kurang efesiennya system pemungutan retribusi di Kabupaten Sinjai, kurangnya pemungutan dari sektor-sektor retribusi di Kabupaten Sinjai, dan kurang aktifnya pemerintah daerah untuk memungut retribusi daerah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retibusi.

Hal ini pun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zhang dan Zou (1997) telah menunjukkan hasil bahwa alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari retribusi daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Adapun faktor yang menyebabkan Retribusi tidak maksimal dalam pemungutannya yaitu, dalam retribusi Jasa Umum terkadang ada kejanggalan yang terdapat di lapangan , terutama retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum dan retribusi pelayanan pasar, kejanggalan ini terjadi karena sebagian besar pungutan lebih besar dari yang seharusnya dan sebagian tidak menyerahkan karcis kepada penyewa tempat parkir. Tirta (2012) menyatakan yang menyebabkan rendahnya retribusi parkir adalah pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan tidak tercapai. Kemudian pengawasan kegiatan retribusi parkir yang belum optimal. Selain itu yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir adalah efektifitas kemampuan organisasi belum mampu mencapai target atau hasil belum sesuai dengan target yang direncanakan.

Dalam Retribusi Jasa Usaha, terutama dalam Jasa Usaha Pasar Grosir dan Atau Pertokoan yaitu dari faktor pedagang disebabkan oleh keengganan pedagang untuk membayar retribusi. Alasan mereka antara lain ketidak sesuaian antara besarnya retribusi yang mereka bayarkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak dinas kepada pedagang, Pedagang belum mendapat fasilitas yang mencukupi di lokasi tempat mereka berjualan yang digunakan. Akibatnya,pendap-atan yang mereka terima tidak menentu. Terkadang mendapat keuntungan, dan terkadang sebaliknya merugi karena dagangannya tidak laku. Kondisi seperti itu, menjadikan penghasilan mereka hanya sebatas cukup untuk menyambung hidup”. Hal lainnya adalah rendahnya pengawasan terhadap juru pungut retribusi pasar dan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, sehingga belum bisa mencapai hasil yang maksimal dalam penerimaannya. Sebab masih ditemukan juru pungut retribusi yang nakal dan tidak menyerahkan hasil pemungutan retribusi yang dilakukan. Menurut Halim, (2004 : 115). Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam retribusi perizinan, faktor yang menyebabkan adanya kendala dalam pemungutannya yaitu biaya pengurusan izin sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil. besarnya biaya perizinan seringkali tidak transparan, dan pemohon tidak mengetahui besar biaya resmi untuk pengurusan izin, dan karena adanya pungutan liar. Menurut Ridwan (2009 : 163) ada beberapa kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan yaitu : 1) Biaya perizinan, 2) Waktu, dan 3) Persyaratan.

1. **Pengaruh Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai**

Hasil penelitian yang telah di uji dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 dapat diketahui bahwa variabel Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkandengan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berbanding terbalik dengan teori Sollow dimana penerimaan Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan. Berdasarkan teori dimana Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan masuk kedalam faktor-faktor produksi khususnya akumulasi modal. Apabilapenerimaan retribusi meningkat maka akan meningkatkan output berupabarang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) karena retribusi daerah ini digunakan sebagai modal untuk menghasilkan besaran output berupa barang maupun jasa. Namun, berdasarkan data yang ada Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Sinjai cenderung menurun. Hal ini berarti terdapat gap antara teori dan data yang ada. Hal ini disebabkan menurunnya realisasi penerimaanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini yaitu hanya bersumber pada Bank Pembangunan Daerah (BUMD) serta belum maksimalnya pemerintah kabupaten Sinjai dalam memanfaatkan pendapatan daerah dari sektor ini.

Hasil ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan Hasil Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997) tentang pertumbuhan ekonomi di Cina menunjukkan hasil tentang bagaimana alokasi sumber daya fiskal yaitu pendapatan BUMD memperoleh hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Adapun faktor yang menyebabkan Hasil Pengelolaan kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi adalah perusahaan daerah ini merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, namun sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Hal ini berarti perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. Josef Kaho Riwu, (2005 : 188)

1. **Pengaruh Pendapatan Lain-Lain yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai**

Hasil penelitian yang telah di uji dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan lain-lain yang Sah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan lain-lain yang Sah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Teori Solow, dimana pertumbuhan
ekonomi tergantung pada penyediaan faktor-faktor produksi, salah satunya adalah
akumulasi modal dalam hal ini adalah pendapatan lai-lain yang sah. Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa variabel input khususnya pendapatan lai-lain yang sah memiliki peranan penting karena akan menentukan besarnya jumlah output yang dihasilkan. Hal ini disebabkan Pendapatan lain-lain yang Sah digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi dan akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produksi PDRB) dan hal ini juga menunjukkan dalam hal pemungutan slah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Lain-lain yang Sah di Kabupaten Sinjai sudah mencukupi untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai.

Hal ini pun tidak sejalan Pada Penelitian yang dilakukan Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal yaitu pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Adapun faktor yang menyebabkan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, seiring dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah kurang memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor-sektor tersebut. Sumber-sumber pendapatan daerah ini yaitu lain-lain pendapatan yang sah sudah semestinya dioptimalkan, baik dari segi jumlah nilai maupun dari sisi kuantitas pembayarannya.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Secara umum, sumber pendapatan daerah itu diatur oleh Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 157 Undang-undang Pemerintahan Daerah disebutkan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya Lain-lain pendapatan yang sah.

1. **Pengaruh Pendapata Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai**

Hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan hasil analisis SPSS 21 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode dalam penelitiannya berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ProvinsiSulawesi Utara Tahun 2001-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Harianto (2007) dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Sebagaimana Menurut peraturan pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut peraturan pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah , APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah salah satunya adalah pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk membiayai pembangunan didaerahnya.Semakin banyak pembangunan didaerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat didaerah dan memperbesar kesempatan kerja didaerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Hasil pajak daerah
3. Hasil retribusi daerah
4. Hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan
5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
6. Dana perimbangan
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
8. Hibah

Menurut data keuangan daerah kabupaten Sinjai menjelaskan bahwa sumber utama pendapatan daerah lebih dari 70% dari pendapatan transfer dengan transfer terbesar pada bagian dana perimbangan dengan jumlah nominal sebesar 630 milyar rupiah, sedangkan belanja daerah Kabupaten Sinjai sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional yang menyerap 59% dari dana belanja. Jumlah alokasi pada belanja operasional teralokasikan 491 milyar rupiah untuk belanja pegawai. Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa, ketika terjadi peningkatan alokasi transfer diikuti pula dengan peningkatan belanja yang tinggi. Selain itu, pada saat transfer dana dari pemerintah pusat menurun, maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah, fenomena ini dikenal dengan istilah *flypaper effect*.

Ini membuktikan bahwa Kabupaten Sinjai masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah harus meningkatkan potensi sumber pendapatan asli daerah, penngembangan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional dan dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten dengan melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapata Lain-lain yang Sah. Mengacu pada rumusan masalah, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai sebesar 1,693 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 > α = 0, 05.
2. Variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai sebesar 0,616 dengan nilai signifikansi sebesar 0,565 < α = 0, 05.
3. Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai sebesar -1,553 dengan nilai signifikansi sebesar 0,181 > α = 0, 05.

96

1. Variabel Pendapatan lain-lain yang Sah berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai sebesar -2,462 dengan nilai signifikansi sebesar 0,057 > α = 0, 05.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan lain-lain yang Sah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. Variabel Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh X terhadap Y yaitu 81,5 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh fakor lain yang tidak masuk dalam penelitian.
3. **Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai hendaknya lebih mengoptimalkan dan mempertahankan sumber pendapatan dari Pajak Daerah sehingga pengalokasiannya merata dalam pembanguanan serta konstribusinya akan selalu meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai serta lebih menggali potensi-potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai hendaknya lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan dan pemungutan dari Retribusi Daerah, seperti , pelayanan Parkir dan pelayanan pasar yang tidak sesuai dengan pembayarannya, pengawasan yang maksimal dalam pemungutan retribusi jasa grosir dan pertokoan yang sering terlambat dan tidak menyerahkan hasil pemungutannya serta pelayanan yang tidak sesuai dengan fasilitas.
3. Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai hendaknya lebih memaksimalkan pengawasan dalam sumber pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sehingga konstribusinya sangat baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai hendaknya lebih meningkatkan pemungutan/penagihan dari sumber pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah dan pengawasannya sehingga pengalokasiannya merata dalam pembanguanan agar memacu peningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber dana Ekstern dapat diminimalisir.
5. Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai hendaknya lebih mengoptima-lkan semua potensi atau sektor-sektor seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan dan semua yang dimiliki Daerah agar memacu peningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber dana Ekstern dapat diminimalisir, serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan bijak, efektif dan efisien agar dapat menstimulus peningkatan infrastruktur seperti pembagunan jembatan, pembanguanan pasar, perbaikan jalan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah
6. Penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau dengan melakukan perbandingan dengan variabel lain yang akan digunakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sinjai.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statisik. *Dalam Berbagai Edisi*. Makassar

Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.

Ernawati. 2009. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Grace N, Ofoegbu, David, Akwu , Oliver. 2016. Empirical Analysis Of Effect Of Tax Revenue On EconomicDevelopment Of Nigeria. International Journal Of Asian Social Science , 2016, 6(10): 604-613. (Di Akses Pada Tanggal 18 Februari 2017).

Iwan Susanto. 2014. Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012). *Jurnal Ilmiah* ( Diakses pada tanggal 11 Januari 2017).

Kuncoro, 2004. *Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.

Kusnandar dan Siswantoro, Didik.2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembayaran Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Thesis*. Universitas Indonesia.

Mankiw, N. Gregory, 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2009. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan*
*Saran, Cetakan Pertama*, UII Press. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi Offset.

Mudajarat Kuncoro,2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga:Jakarta

Musgrave.1991.*Produk Domestik Regional Bruto*.Universitas Andalas

Nanga Muana.2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Kedua. Pt Raja Grafindo: Jakarta

Rahim, Abd. 2012. “Model Ekonometrika Perikanan Tangkap”. Makassar:Badan Penerbit UNM

Rochmat. Soemitro (1997). Azas dan Dasar Perpajakan I*,* Bandung: Refika Aditama.

Sadono Sukirno, 2008. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, pnerbit PT Raja Grafindo:Jakarta

Santoso.2005. *Statistik Parametrik*. Penerbit Elex Media Computindo:Jakarta

Saragih, 2009, *Analisis Pengaruh PAD terhadap PDRB Kabupaten Dairi*, Universitas Sumatera Utara

Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalamOtonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia

Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2006. *Metode Statistika, Untuk Bisnis dan Ekonomi.*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Suandy, Early.2008. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Sudjana 2005. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta

Suparmoko, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan.* Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Syafrizal, (2014).*Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*.Beduose Media Padang.

Todaro, Michael P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Penerjemah: Haris Munandar. Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tenang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yani. Ahmad. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia.ed.1. cet.1*. PT RajaGrafindo Persada : jakarta